



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pelaksanaan pemasyarakatan Pendidikan Sistem Ganda (PSG) telah berhasil mengubah pola pikir para pelaku pendidikan menengah kejuruan. Semula sangat kuat adanya kecenderungan anggapan bahwa dunia pendidikan dan dunia kerja merupakan dua hal yang berbeda, dimana keduanya berjalan pada jalurnya masing-masing dengan didasarkan pada perspektif yang berbeda. Dunia pendidikan cenderung berpikir dari segi kepentingan pendidikan sebaliknya dunia kerja cenderung berpikir kepentingan ekonomi. Menyikapi hal-hal diatas, sejumlah perubahan dalam sistimnya telah dilakukan antara lain :

- : Pengenalan PSG, Pembentukan Majelis Pendidikan Kejuruan di tingkat pusat, wilayah dan sekolah, , Pengenalan uji kompensensi, Pengenalan Lembar Keterampilan Siswa (LKS), Pengenalan sistim Rekrutmen dan Seleksi peserta pengembangan Kepala Sekolah; dan sejumlah perubahan lainnya. Yang tidak kalah pentingnya, pendidikan kejuruan juga telah melaksanakan perubahan kulturalnya. Kebiasaan – kebiasaan bekerjasama dengan dunia usaha mulai marak (yang belum pernah dilakukan dimasa sebelum reformasi) termasuk kerja kelompok (*team work*) dan jaringan kerja, nilai – nilai yang bernuansa ekonomis mulai dikenalkan dalam penyelenggaran pendidikan kejuruan seperti misalnya pendidikan kewirausahaan, disiplin kerja, efisiensi, kualitas, dan unit

produksi ; nilai – nilai manajemen professional mulai dikenalkan melalui penyelenggaraan pendidikan kejuruan yang dikelola secara terbuka (participative management) kontrol sosial yang makin marak, pemberian otonomi yang makin besar yang diwujudkan dalam bentuk otoritas, tanggung jawab dan akuntabilitas. Reformasi pendidikan kejuruan yang telah menunjukkan nilai – nilai yang positif, namun telah dihadapkan kepada sejumlah komponen yang perlu disiapkan secara bersungguh -- sungguh.

Pokok-pokok perubahan kebijakan yang selama ini dapat dikatakan manajemen yang tidak efektif antara lain : sistim supply driven atas kebutuhan sosial masyarakat, program pendidikan ditentukan secara sepihak (Oleh Depdiknas), tidak mengakui kemampuan yang telah dimiliki sebelumnya, pendidikan adalah proses pembelajaran di sekolah, keahlian yang diperoleh diluar sekolah bukan menjadi tanggung jawab sekolah dan tidak diakui, sistim berbasis sekolah dengan orientasi pada program studi dan berorientasi pada penyelesaian mata pelajaran dalam kurikulum standard (Curriclum based program).

Kelemahan – kelemahan manajemen diatas telah diganti menjadi lebih efektif antara lain : sistim deman driven yang dipacu oleh kebutuhan pasar kerja, program pendidikan disusun, dilaksanakan dan menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat (dunia kerja), secara tegas mengakui kompetensi, darimana dan bagaimana cara memperoleh, pendidikan kejuruan dan dunia usaha/ industri tidak dipisahkan, sistim pendidikan dan

pelatihan mengacu pada profesi dan ketrampilan kejuruan yang standar berorientasi pada penguasaan kompetensi bidang keahlian tertentu (Competence based program).

Di tengah – tengah persaingan seperti yang tersebut diatas, manusia dihadapkan pada perubahan – perubahan. Kondisi tersebut telah mengakibatkan hubungan yang tidak linear antara pendidikan dengan dunia kerja atau “ *one to one relationship*” karena apa yang terjadi di lapangan kerja sulit diikuti oleh pendidikan, sehingga terjadi kesenjangan.

Menyadari akan hal tersebut, pemerintah telah menyempurnakan sistim pendidikan, baik melalui penataan perangkat lunak (Soft ware) maupun perangkat keras (Hard wear). Upaya tersebut, antara lain dikeluarkan Undang–Undang Nomor 32/ Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah, serta diikuti oleh penyempurnaan Undang–undang sistim Pendidikan Nasional yang secara langsung berpengaruh terhadap perencanaan pelaksanaan dan evaluasi pendidikan. Jika sebelumnya manajemen pendidikan merupakan wewenang pusat dengan paradigma *top – down* atau sentralistik, dengan berlakunya undang – undang tersebut kewenangan bergeser pada pemerintah daerah dan kota kabupaten dengan pradigma *bottom – up* atau desentralistik dalam ujud pemberdayaan sekolah.

Dalam kaitan ini, visi, misi dan strategi Dinas Pendidikan pada tingkat Kabupaten dan Kota, harus dapat mempertimbangkan dengan bijaksana kondisi nyata sekolah dan masyarakat dan harus pula mendukung

Kebijaksanaan Nasional yang menjadi prioritas pemerintah, serta harus mampu memelihara kebijakan birokrasi yang lebih tinggi.

Untuk menjalankan reformasi yang telah dimulai tahun 1994, ternyata sejumlah komponen perlu disiapkan secara sungguh-sungguh antara lain : Kurikulum, Personel, Akses siswa, Metode Pengajaran , Evaluasi, Pembiayaan, Pengaturan, organisasi, Peran dan Tanggung jawab serta Hukum Industri. Dengan kata lain sejumlah komponen tersebut harus siap semuanya untuk mencapai tujuan reformasi pendidikan kejuruan yang telah dicanangkan pada tahun 1994.

Perbaikan pendidikan apakah itu perbaikan kecil – kecil (inovasi) atau perubahan dengan loncantan besar (reformasi, revitalisasi, rekonfigurasi, restrukturisasi) selalu dimulai dari kurikulum. Karena itu kesiapan kurikulum merupakan langkah awal yang paling menentukan kegiatan komponen -- komponen lainnya :

Jika sebelumnya reformasi pengembangan kurikulum lebih di dominasi oleh orang dalam Depdiknas (*inward looking*), maka pengembangan kurikulum pada saat ini lebih diwarnai campur tangan pihak pengguna tamatan pendidikan kejuruan (*out ward looking*) dan bahkan merekalah yang menentukan apa yang sebaiknya diajarkan kepada siswa Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).

Berdasarkan uraian tersebut penulis tertarik untuk meneliti tentang Efektifitas Fungsi - Fungsi Manajemen PSG pada SMK Esa Prakarsa Kabupaten Langkat, yang merupakan salah satu SMK yang baru menamatkan

siswa empat kali, tetapi sekolah tersebut telah melakukan Praktek kerja Industri (Prakerin) sampai ke Malaysia. Hal inilah yang menarik perhatian penulis untuk mengadakan penelitian pada sekolah tersebut.

B. Fokus Penelitian

Setelah melakukan observasi pada SMK prakarsa Kabupaten Langkat, maka penelitian di fokuskan tentang Efektifitas Fungsi Manajemen PSG pada SMK Esa Prakarsa Kabupaten Langkat.

C. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian yang telah ditetapkan tersebut, maka pertanyaan penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana efektivitas fungsi manajemen PSG pada SMK Esa Prakarsa Kabupaten Langkat.
2. Bagaimana efektivitas fungsi manajemen PSG yang dilaksanakan oleh kepala sekolah di SMK Esa Prakarsa Kabupaten Langkat ?
3. Bagaimana efektivitas fungsi manajemen PSG yang dilaksanakan guru di SMK Esa Prakarsa Kabupaten Langkat.
4. Apakah dengan diterapkannya PSG pada SMK Esa prakarsa Kabupaten Langkat membuat sistim kerja menjadi aktif.

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian berdasarkan pertanyaan – pertanyaan diatas adalah untuk mengetahui :

1. Pelaksanaan PSG di SMK Esa Prakarsa Kabupaten Langkat.
2. Efektifitas fungsi Manajemen PSG yang dilakukan Kepala di SMK Esa Prakarsa Kabupaten Langkat.
3. Bagaimana kegiatan yang dilakukan antara personil yang ada pada SMK Esa Prakarsa Kabupaten Langkat
4. Sistim kerja berperan dalam pelaksanaan sistim ganda pada SMK Esa Prakarsa

E. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan yang berarti bagi :

1. Kepala SMK sebagai umpan balik untuk pelaksanaan PSG pada masa yang akan datang, bagaimana melaksanakan upaya yang lebih efektif
2. Sebagai bahan masukan kepada guru dan staf demi peningkatan kualitas PSG pada masa yang akan datang, sehingga lebih bermanfaat bagi siswa sekolah di dunia Industri
3. Sebagai bahan masukan bagi dunia usaha dan dunia Industri untuk masa mendatang, yang membawa mamfaat bagi sekolah dan siswa
4. Sebagai masukan pada Dinas Pendidikan untuk program PSG pada masa datang, sehingga lebih terprogram dengan baik

5. Sebagai bahan Informasi bagi pihak ketiga tentang program SMK, sehingga lebih mengenal lebih dekat
6. Sebagai bahan masukan untuk penelitian selanjutnya bagi mereka yang ingin mengikutinya, sehingga lebih mudah dan lebih sesuai dengan kampus PSG tersebut

